

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

#### **1. Sejarah Etnis Tionghoa di Sumatera Barat**

Kajian tentang sejarah kehidupan orang etnis Tionghoa di Indonesia adalah suatu fenomena yang sangat menarik sejak abad ke-20. Studi tentang kehidupan orang Tionghoa dari berbagai perspektif bukanlah hal yang baru, terutama di kawasan Asia Tenggara, Amerika dan Australia. Keberadaan orang Tionghoa sebagai etnis minoritas di Indonesia dengan berbagai permasalahannya, sering disorot secara umum. Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki ciri khusus dengan penduduknya yang dinamis dan memiliki kemampuan di bidang ekonomi, terutama keahliannya dalam berdagang.<sup>1</sup>

Persentuhan orang-orang etnis Tionghoa dengan masyarakat Sumatera Barat pada mulanya terjadi melalui perantara dagang. Aktivitas perdagangan orang Tionghoa dengan orang Minangkabau sudah diawali berabad yang lalu, ketika orang etnis Tionghoa melakukan perdagangan internasional dengan raja-raja di wilayah Nusantara. Jumlah orang etnis Tionghoa yang datang ke Sumatera Barat semakin meningkat, ketika jalur perdagangan juga dibuka di pantai barat Sumatera sejak abad ke 13. Perdagangan dilakukan melalui jalur sungai dan jalan setapak dari daratan tinggi ke pelabuhan di pantai Pariaman, Tiku, Ulakan, Kota

---

<sup>1</sup> Erniwati, Asap Hio Di Ranah Minang (Yogyakarta: Ombak, 2007), hal. 2.

Tengah dan Pantai Padang yang kemudian dikenal sebagai Pantai Pariaman (Piaman) sampai pertengahan abad ke-17.<sup>2</sup>

Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai Barat pulau Sumatera sekaligus menjadi ibukota provinsi Sumatera Barat. Seperti yang diketahui, kehidupan masyarakat di perkotaan sangat heterogen. Semua lapisan masyarakat bisa dikatakan hidup berdampingan. Maka begitu juga dengan kota Padang. Di kota Padang ini terdapat keberagaman etnis dan suku yang mendiami di setiap sudut kota. Penduduk kota Padang sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau, etnis lain yang juga bermukim di kota Padang adalah Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Aceh, Batak dan Tamil.<sup>3</sup>

Orang Tionghoa (dalam penelitian ini disebut etnis Tionghoa) diketahui telah berada di Kota Padang ratusan tahun lamanya. Meski demikian, mereka menghadapi beragam permasalahan untuk dapat diterima sebagai orang Indonesia. Kondisi itu ditengarai terutama disebabkan oleh kebijakan segragasi kolonialisme Belanda di masa lalu, yang memisahkan orang Tionghoa dari orang lokal, yang disebut “pribumi”. Pemisahan itu diterapkan pada banyak bidang, antara lain pekerjaan, permukiman, status hukum, dan politik. Karena itu, sulit menemukan saling pengertian dalam hubungan antara orang Tionghoa dan orang lokal. Satu-satunya komunikasi di antara mereka tampak hanya berlangsung di pasar, atau semata didorong oleh motif ekonomi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>3</sup> BPS Kota Padang Dalam Angka 2002, hal. 22.

<sup>4</sup> Riniwaty Makmur, *Orang Padang Tionghoa* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2018), hal. 21.

Dari data statistik pada tahun 2016 diperkirakan ada sekitar 12 ribu orang Tionghoa yang tinggal di kota Padang.<sup>5</sup> Mereka sudah menjadi bagian dari Kota Padang sejak zaman penjajahan dan memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan sosial ekonomi di Kota Padang. Sebagian besar etnis Tionghoa Kota Padang bermukim di Kelurahan Pondok, Kecamatan Padang Barat dengan pekerjaan utama sebagai pedagang. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan terjadi di Kota Padang, termasuk pola bertempat tinggal orang-orang etnis Tionghoa. Beberapa hal yang mendorong terjadinya perubahan ini adalah berkembangnya permukiman-permukiman baru di Kota Padang (di luar pecinan) dengan harga terjangkau. Gempa besar yang terjadi pada tahun 2009, yang meluluhlantakkan sebagian besar daerah pecinan, juga mendorong cukup banyak orang-orang Etnis Tionghoa untuk pindah mencari rumah tinggal ke luar dari pecinan. Kendati telah pindah dari pecinan, kebanyakan orang-orang etnis Tionghoa tetap berkunjung ke sekitar Kampung Pondok.<sup>6</sup>

Sebuah fakta sejarah yang tak terbantahkan, bahwa warga etnis Tionghoa adalah pendatang terlepas dari kenyataan tentang kedatangannya terjadi berabad-abad yang lampau, sehingga keberadaannya bukan lagi hal baru. Fakta sejarah ini tak bisa dihapus dan harus diterima sebagai bagian integral kehidupan orang Tionghoa di Indonesia. Hak untuk hidup di tempat tinggalnya sekarang secara legal sudah dilindungi Undang-Undang, terutama karena warga etnis Tionghoa telah memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), lengkap dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Jadi secara sosiologis, posisi warga

---

<sup>5</sup> BPS Kota Padang Dalam Angka 2016.

<sup>6</sup> Riniwaty Makmur, *op. cit.*, hal. 27.

etnis Tionghoa telah berubah dari pendatang menjadi penduduk dan warga Negara. Selain itu, Pasal 27 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dasar ini semakin mempertegas tentang kedudukan Etnis Tionghoa bahwa mereka telah menjadi warga Negara Indonesia bukan hanya sebagai status, tetapi juga ikut aktif secara sah dan legal dalam unsur-unsur pemerintahan.<sup>7</sup>

Memasuki masa reformasi, kedudukan orang-orang Tionghoa ini semakin dipertanyakan. Mereka ini sebagai warga yang menumpang tinggal di Indonesia, atau dikatakan sebagai warga Indonesia. Pemerintah menjawabnya dengan alasan yang kuat disertai dasar hukum yang jelas yaitu, etnis Tionghoa yang ada di Indonesia statusnya resmi sebagai warga negara Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 26 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara”.<sup>8</sup>

Era reformasi juga telah berhasil membukakan pintu yang sangat lebar bagi etnis Tionghoa di Indonesia untuk lebih leluasa menyatakan identitas etnisnya. Sejak pemerintahan B.J Habibie melalui instruksi presiden No. 26 tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi, seluruh aparatur pemerintahan telah pula diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan

---

<sup>7</sup> Agung Suharyanto, “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah” Skripsi Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, Medan. 2014. hal. 2

<sup>8</sup> *Ibid.*,



istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan penduduk keturunan Cina (Tionghoa) dengan negara Indonesia pada umumnya.<sup>9</sup>

## 2. Aktivitas Politik Etnis Tionghoa

Peranakan Cina (etnis Tionghoa) sudah berperan aktif dalam politik pada era sebelum kemerdekaan dan setelah merdeka di rezim Soekarno, tetapi kemudian berakhir pada rezim Soeharto. Setelah lengsernya Soeharto pada Mei 1998 dan mulainya era reformasi, aktifitas perpolitikan etnis Cina dimulai kembali. Setelah runtuhnya rezim Soeharto beberapa kelompok muda Etnis Cina (etnis Tionghoa) membentuk sebuah kelompok yang kemudian diberi nama Partai Reformasi Tionghoa Indonesia. Pemilu pertama setelah runtuhnya rezim Soeharto dilaksanakan pada Juni tahun 1999, meskipun pada akhirnya Partai Reformasi Tionghoa Indonesia ini tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Satu-satunya partai yang lolos kualifikasi dan berpartisipasi pada pemilu saat itu adalah Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI)<sup>10</sup>

Partai Bhinneka Tunggal Ika berhasil mendudukkan salah satu anggotanya di parlemen. Kemudian ada dua orang keturunan Tionghoa lain yang lolos ke parlemen salah satunya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan satu lagi dari Partai Amanah Nasional (PAN), kemudian ada satu lagi masuk ke dalam jajaran kabinet.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Juliastutik, "Perilaku Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi", Jurnal Humanity Vol.6 No. 1, 2010, hal. 46.

<sup>10</sup> Melly G. Tan, *Etnis Tionghoa Di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 20.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

Pola aktivitas politik etnis Tionghoa pada era Soeharto tampaknya pola politik golongan pialang (*broker politics*). Kepentingan etnis Tionghoa diartikulasikan melalui tokoh-tokoh Tionghoa yang memiliki hubungan dengan para pejabat pribumi. Sejumlah kecil institusi yang disponsori oleh pemerintah seperti BAKOM dan lembaga setengah resmi seperti CSIS sering digunakan untuk menyalurkan berbagai tekanan etnis Tionghoa dan sistem *Cukong* juga merupakan saluran untuk memberikan masukan dalam bidang politik. Dapat diperdebatkan sejauh mana tekanan-tekanan ini efektif, tetapi jelas bahwa pemerintah masih memperlihatkan keenggannya untuk mencegah etnis Tionghoa sebagai figur politik. Ini mungkin karena prasangka elit pribumi bahwa Tionghoa Indonesia lebih Cina daripada Indonesia, dan karena orang Tionghoa masih merupakan sasaran serangan golongan nasionalis, adalah lebih aman untuk mempertahankan mereka dalam kondisi tidak terlalu menonjol. Sebenarnya ini juga memperlihatkan bahwa orang Tionghoa di Indonesia sebagai minoritas mutlak memiliki pengaruh yang sangat terbatas dalam bidang politik.<sup>12</sup>

Era Reformasi yang ditandai dengan tumbangannya pemerintahan orde baru, iklim demokrasi secara nasional telah membuka ruang bagi warga keturunan Tionghoa untuk berpartisipasi di bidang politik, walaupun terkesan pelan dan lambat. Pada umumnya mereka yang terlibat sebagai politisi adalah mereka yang mapan dari sisi ekonomi, sehingga orientasi mereka di kancah politik bukan untuk mencari sumber ekonomi, melainkan lebih pada eksistensi, pengabdian dan pelayanan. Berbeda dengan orientasi para politisi pada umumnya yang tidak lebih

---

<sup>12</sup> Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, (Jakarta: LP3ES, 1999) , hal. 98-99.

mengejar akses ekonomi, kekuasaan serta fasilitas yang dibiayai dengan kas negara atau daerah. Dengan keterlibatan etnis Tionghoa di panggung politik nasional akan terjadi interaksi politik antara politisi etnis Tionghoa-Pribumi yang dapat menularkan etos dan mentalitas orang Tionghoa kepada sesama politisi, dimana prinsip dagang yang mengedepankan rasa saling percaya dan efisiensi diharapkan dapat membangun keterwakilan yang tulus, tidak semu antara rakyat dan wakilnya di parlemen. Kebijakan publikpun diharapkan berpihak pada rakyat banyak.<sup>13</sup>

Menurut Muhammad Darwis, seorang Sosiolog dari Universitas Hasanudin, sebagaimana dikutip oleh Juliastutik, mengatakan bahwa: “Ada yang menarik dari fenomena turunnya etnis Tionghoa ke dunia politik yaitu orientasi mereka di kancah politik bukan untuk mencari sumber ekonomi, tetapi lebih pada eksistensi dan pengabdian serta pelayanan”. Eksistensi yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan status kewarganegaraan, yang pada hakekatnya etnis Tionghoa ini terlibat dalam politik praktis adalah semata menunjukkan bahwa etnis Tionghoa ini adalah bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk membela negara Indonesia baik dari ancaman dalam negeri sendiri maupun ancaman dari luar. Pada intinya etnis Tionghoa siap bersama warga negara pada umumnya untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Juliastutik, *op. cit.*, hal. 49

<sup>14</sup> Muhammad Darwis (2008) sebagaimana dikutip Juliastutik, *op. cit.*, hal. 54

Penelitian oleh Hendry Eka yang dikutip oleh Juliastutik juga mengemukakan bahwa: Motivasi etnis Tionghoa berpartisipasi dalam dunia politik, tidak semata untuk merebut kekuasaan, akan tetapi lebih kepada keinginan agar bagaimana aspirasi etnis tersebut yang selama ini “dikebiri”, dapat kembali mereka peroleh. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa ada yang berpendapat bahwa trend partisipasi politik etnis Tionghoa pada politik tidak dimaksudkan untuk merebut kekuasaan, seperti yang mereka lakukan pada bidang ekonomi, akan tetapi lebih kepada kehendak keterwakilan dalam pemerintahan atau kekuasaan, agar mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka dan tidak dianggap lagi sebagai kelompok masyarakat kelas dua (*the second class*).<sup>15</sup>

Namun dalam prakteknya tidak serta merta orang-orang Cina (etnis Tionghoa) mengambil kesempatan tersebut untuk terjun langsung ke dunia politik praktis. Berdasarkan hasil penelitian TJ. Lan tahun 1998 yang dikutip dalam jurnal Juliastutik, setidaknya terdapat lima model cara pandang orang Cina (etnis Tionghoa) kaitannya dengan partisipasi politik praktis, yaitu:

1. Yang merasa perlu menonjolkan identitas etnis mereka dan memperjuangkan hak mereka sebagai golongan, misalnya dengan mendirikan partai Tionghoa.
2. Mereka yang tidak mau menjadikan etnis atau agama sebagai basis gerakan, melainkan melalui platform persamaan hak, misalnya dengan mendirikan Partai Bhinneka Tunggal Ika.
3. Kelompok yang lebih menyukai sebuah forum yang tujuan utamanya lebih sebagai *pressur group*.
4. Mereka yang membentuk paguyuban kelompok karena perasaan senasib sepenanggungan, misalnya dengan mendirikan paguyuban sosial marga “Tionghoa Indonesia”.

---

<sup>15</sup> Hendry Eka (2010) sebagaimana dikutip Juliastutik, *op. cit.*, hal. 55



5. Mereka yang bergabung dalam partai politik yang terbuka seperti PDI-P, PAN dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

## B. Rumusan Masalah

Jika ditelusuri secara mendalam pada saat sekarang pun etnis Tionghoa masih apatis terhadap politik terutama mereka yang berasal dari kalangan masyarakat biasa. Hanya ada beberapa *leader* yang berani untuk maju ke depan dan mengikuti kontestasi politik. Salah satu faktor yang dominan adalah ketidakfleksibelan mereka dalam bergaul dengan masyarakat mayoritas, sehingga membuat mereka tidak mampu bertahan di dalam dunia politik. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Erniwati<sup>17</sup>:

Sebetulnya sekarang kalau kita mau telusuri orang etnis Tionghoa secara mendalam mereka juga masih apatis kok dengan yang namanya politik, terutama bagi mereka yang masyarakat biasa, hanya beberapa leader yang berani maju kedepan, contoh salah satunya adalah Alex, dia bertahan, dan kebertahanan Pak Alex ini sebetulnya tidak terlepas dari back up seluruhnya, contoh Alex, Albert, yang lain kan tidak ada muncul, yang lain mencoba untuk muncul tapi kan selalu kalah, mengapa kalah? pertama mereka tidak mampu masuk ke dalam ruang yang paling besar yaitu dia tidak bisa menjadi bagian dari masyarakat secara luas, karena ada ketidakfleksibelan personaliti-personaliti.

---

<sup>16</sup> TJ. Lan (1998) sebagaimana dikutip Julistutik, *op. cit.*, hal. 46

<sup>17</sup> Wawancara bersama Ibu Erniwati, dalam penelitian ini bertindak sebagai informan triangulasi data, Ibu Erniwati merupakan akademisi/dosen dan ketua Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, beliau merupakan peneliti tentang etnis Tionghoa Kota Padang. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu buku yang berjudul “Asap Hio di Ranah Minang”, naskah asli buku ini merupakan tesisnya di Program Studi Sejarah, Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002, yang berjudul “Perhimpunan Kematian Tionghoa: Tinjauan Terhadap Aktivitas Sosial-Budaya Himpunan Bersatu Teguh Di Padang 1965-1990”. Peneliti berkesempatan melakukan wawancara bersama beliau pada tanggal 19 Maret 2019, pukul 11.00 WIB, di ruangnya di kantor ketua jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawa Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang. (lihat lampiran foto no. 1, surat keterangan wawancara lampiran dokumen no. 1)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Erniwati di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas orang-orang etnis Tionghoa masih apatis terhadap yang namanya politik. Hanya beberapa orang di antaranya yang berani untuk maju dan masuk ke dalam ranah politik dan bisa bertahan, contohnya Alex Indra Lukman dan adiknya Albert Hendra Lukman. Masa orde baru telah memaksa mereka mengeklusifkan diri sehingga membuat personaliti mereka tidak fleksibel untuk bergaul dengan masyarakat mayoritas, serta pada masa orde baru mereka hanya diberi peluang pada sektor perekonomian, sehingga sampai saat ini mereka masih terkenal cakap pada sektor bisnis dan perekonomian dan jarang untuk bisa terjun ke ranah perpolitikan.

Etnis Tionghoa merupakan kelompok minoritas dalam posisi budaya dan politik, akan tetapi kepintaran etnis Tionghoa dalam berdagang telah membuat mereka mendominasi sektor perdagangan dan bisnis di tingkat lokal dan nasional serta berpengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia. Kota Padang memiliki sebuah fenomena yang cukup menarik untuk diteliti yaitu hubungan antara etnis Tionghoa dengan kekuasaan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa mayoritas etnis Tionghoa masih apatis terhadap politik, dan dari awal kedatangannya hingga saat ini pun mereka lebih banyak bekerja di sektor perekonomian.

Namun, di Kota Padang telah ada beberapa orang tokoh etnis Tionghoa yang telah masuk ke ranah politik dengan menjadi kader dan pengurus partai, melalui beberapa partai politik yang berbeda. Dari data yang telah peneliti peroleh

berikut ini akan dilampirkan data tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Kota Padang yang telah masuk ke ranah politik dengan menjadi pengurus partai:

**Tabel 1.1**

**Nama-nama Tokoh Etnis Tionghoa Kota Padang Dalam Kepengurusan Partai Politik**

No.	Nama	Jabatan	Partai	Tahun
1.	Alex Indra Lukman	<i>Ketua DPD Provinsi Sumatera Barat</i>	PDIP	2010-2020
2.	Albert Hendra Lukman	Ketua DPC Kota Padang	PDIP	2010-2020
3.	Ferryanto Gani	Bendahara DPD Provinsi Sumatera Barat	GERINDRA	2017-2022
4.	Hanura Rusli	Kader/Pengurus Cabang	GERINDRA	
5.	Lauwwira	Kader/Pengurus Cabang	PDIP	
6.	Paula Lindawati	Kader/Pengurus Cabang	DEMOKRAT	
7.	Christian Rudy	Kader/Pengurus Cabang	PDIP	
8.	Felix Iskandar	Kader/Pengurus Cabang	PSI	

*Diolah dari berbagai sumber.*

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di atas, dapat dijelaskan bahwa telah ada beberapa orang etnis Tionghoa yang telah masuk ranah politik melalui partai politik dengan menjadi kader dan pengurus. Bahkan beberapa di antaranya telah menjadi pimpinan partai, baik di tingkat cabang (kota) maupun di tingkat daerah (provinsi). Dari data di atas dapat kita lihat bahwa Alex Indra Lukman telah memiliki jabatan tertinggi di dalam kepengurusan partai di tingkat provinsi yaitu dengan menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) selama periode 2010-2020. Hal ini menjelaskan bahwa Alex Indra Lukman telah memiliki karir politik yang cukup tinggi.

Kemudian diantara semua tokoh-tokoh yang telah terjun ke partai politik dengan menjadi pengurus dan pimpinan partai ini, ada beberapa di antaranya telah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Akan tetapi, ternyata tidak seluruhnya mampu bersaing dan mendapatkan jabatan politik tersebut. Pada data yang peneliti peroleh di bawah ini, peneliti lampirkan tokoh-tokoh Tionghoa yang pernah mencalonkan diri di pemilu legislatif dan berhasil menduduki jabatan politik tersebut:

**Tabel 1.2**  
**Nama-nama Anggota Legislatif Etnis Tionghoa Kota Padang**

No.	Nama	Partai	Jabatan	Tahun
1.	Paula Lindawati	Demokrat	Anggota DPRD Kota Padang	2009-2014
2.	Albert Hendra Lukman	PDI-P	Anggota DPRD Kota Padang	2009-2014
			Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat	2014-2019
3.	Alex Indra Lukman	PDI-P	Anggota DPR-RI Komisi V	2014-2019

*Data Sekunder KPU*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada tiga orang tokoh-tokoh etnis Tionghoa yang telah dan sedang menduduki jabatan politik sebagai anggota legislatif. Di antaranya telah menjadi anggota legislatif di tingkat kota, provinsi, dan yang tertinggi yaitu Alex Indra Lukman yang menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Selain yang telah menduduki jabatan politik tersebut, peneliti juga lampirkan daftar calon legislatif etnis Tionghoa Kota Padang yang akan mencalonkan diri pada pemilu legislatif 2019 mendatang.



**Tabel 1.3**

**Nama-nama Calon Anggota Legislatif Etnis Tionghoa Kota Padang 2019**

No.	Nama	Partai	Jabatan	Tahun
1.	Hanura Rusli	Gerindra	Caleg DPRD Kota Padang	2019-2024
2.	Paula Lindawati	Demokrat	Caleg DPRD Kota Padang	2019-2024
3.	Lauwwira	PDIP	Caleg DPRD Kota Padang	2019-2024
4.	Christian Rudy K.S	PDIP	Caleg DPRD Kota Padang	2019-2024
5.	Felix Iskandar	PSI	Caleg DPR-RI Dapil Sumbar Satu	2019-2024
6.	Albert Hendra Lukman	PDI-P	Caleg DPRD Provinsi Sumbar Dapil Sumbar Satu	2019-2024
7.	Alex Indra Lukman	PDI-P	Caleg DPR-RI Dapil Sumbar Satu	2019-2024

*Data Sekunder KPU*

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di atas menunjukkan bahwa telah ada beberapa orang etnis Tionghoa yang mampu menduduki jabatan politik, dan beberapa diantaranya sedang mencalonkan diri kembali untuk periode kedua seperti Albert Hendra Lukman (DPRD Provinsi Sumatera Barat), serta kakak kandungnya sendiri yaitu Alex Indra Lukman yang juga merupakan petahana yang mencalonkan diri kembali di pemilihan legislatif DPR-RI pada 2019 nanti. Namun diantara beberapa tokoh politik etnis Tionghoa di atas peneliti tertarik untuk meneliti Alex Indra Lukman. Alex Indra Lukman telah berkiprah di ranah politik paling lama diantara beberapa tokoh yang lain.

Karir politik Alex Indra Lukman sendiri telah dimulai sejak menjadi anggota Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun yaitu pada tahun 2000-2005, kemudian dipilih menjadi

wakil bendahara DPD PDI-P Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih satu tahun yaitu pada tahun 2005-2006, kemudian dia dipilih menjadi bendahara DPD PDI-P Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih satu tahun juga yaitu pada tahun 2006-2007, kemudian dipilih lagi untuk menjadi sekretaris DPD PDI-P Provinsi Sumatera Barat selama tiga tahun yaitu pada tahun 2007-2010, dan jabatan tertinggi yang dipegang adalah ketua DPD PDI-P Provinsi Sumatera Barat periode 2010-2015, dan pada saat pemilihan ketua untuk periode selanjutnya yaitu tahun 2016-2020, Alex terpilih kembali untuk menjadi ketua DPD PDI-P Provinsi Sumatera Barat.<sup>18</sup> Pada saat ini Alex Indra Lukman juga menjabat sebagai bendahara Fraksi PDI-P di DPR-RI. Alex Indra Lukman telah menjadi pengurus partai sejak tahun 2000, mulai dari tingkat bawah kemudian menjadi pimpinan partai, dan saat ini sedang menduduki jabatan politik di tingkat yang lebih tinggi yaitu menjadi anggota DPR-RI. Alex Indra Lukman sendiri bergabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak tahun 2000, itu berarti Alex Indra Lukman telah berkiprah dalam ranah politik kurang lebih selama 19 tahun.

Selama beraktifitas di dalam kepemimpinan partai, Alex Indra Lukman juga terlibat aktif dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Padang. Hal ini merupakan salah satu dari beberapa tugas dan fungsi partai politik menurut Undang-Undang, yaitu sebagai sarana komunikasi politik. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik bertugas untuk menyalurkan aspirasi dan opini masyarakat, dimana aspirasi dan opini ini kemudian dijadikan rekomendasi untuk

---

<sup>18</sup> Data online website Sekretariat Jenderal DPR-RI ([dpr.go.id](http://dpr.go.id)), blog Profil Anggota DPR-RI Alex Indra Lukman, diakses pada tanggal 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB. Data ini telah dikonfirmasi langsung kebenarannya oleh Alex Indra Lukman pada saat melakukan wawancara terkait penelitian ini di kantor DPD PDI-P Provinsi Sumatera Barat, (lihat lampiran dokumen no. 2)

pengambilan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Bersama dengan elemen masyarakat dan mahasiswa, Alex Indra Lukman sering melakukan diskusi dan advokasi, seperti yang disebutkan oleh Bapak Ramanda Putra<sup>19</sup>:

Saya kenal sosok pak alex sejak 2011, mulai dari aksi advokasi pedagang pasaraya pasca gempa 2009, jadi saya dulu sering aktif berdiskusi dengan beliau, kebetulan saya di UKM PHP FISIP UNAND, kami sering diskusi membiacrakan masalah pembangunan pasaraya karena kita butuh dukungan dari partai politik juga kan, rata-rata kita melakukan komunikasi dengan lintas partai untuk mendorong percepatan pembangunan pasaraya pasca gempa, sering diskusi dengan beliau baik di kantor partai maupun ditempat makan.

Berdasarkan keterangan Bapak Ramanda di atas, bahwasannya Alex Indra Lukman telah aktif melakukan tugas-tugasnya sebagai anggota partai politik. Sering melakukan diskusi dan advokasi bersama mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya untuk menampung aspirasi dan opini masyarakat Kota Padang. Hal ini telah sering dilakukan jauh sebelum Alex Indra Lukman menjabat sebagai anggota legislatif seperti saat ini.

Alex Indra Lukman saat ini menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019. Alex Indra Lukman di tempatkan dalam Komisi V (lima) dari Fraksi PDI-P. Komisi V (lima) DPR-RI sendiri memiliki ranah kerja di bidang infrastruktur dan perhubungan, yaitu bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

---

<sup>19</sup> Wawancara bersama Bapak Ramanda Putra, dalam penelitian ini bertindak sebagai informan triangulasi data. Ramanda Putra saat ini merupakan staf ahli Alex Indra Lukman di DPR-RI, wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2019, pukul 15.00 WIB, di Kantor DPD PDI-P Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Veteran Dalam No. 50 Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang. (lihat lampiran foto no.2, surat keterangan wawancara lampiran dokumen no.3)

(BMKG), Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (BPPN), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS), dan Kementerian Desa (Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).<sup>20</sup>

Alex Indra Lukman dulunya adalah salah satu pengurus perhimpunan etnis Tionghoa tertua di kota Padang, yaitu Himpunan Tjinta Teman atau Hok Tek Tong (HTT), tetapi saat ini diketahui sudah tidak aktif lagi di dalam himpunan. Alex sendiri pada awalnya merupakan seorang etnis Tionghoa yang beragama Katholik, kemudian pada tahun 2007 telah merubah keyakinannya menjadi agama Islam (muallaf). Namun hal ini ternyata menimbulkan banyak pendapat miring oleh masyarakat yang menganggap bahwa motivasi keislamannya adalah untuk kepentingan melanggengkan karir politiknya di Kota Padang. Kota Padang sendiri seperti yang kita ketahui adalah mayoritas beragama Islam.<sup>21</sup>

Alex Indra Lukman lahir di Kota Padang 48 tahun silam, menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah atas di kota Padang, kemudian melanjutkan ke pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Frankfurt Am Main, di Jerman pada tahun 1990-1996, kemudian mengambil jurusan Ilmu Komuniasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Eka Sakti tahun 2004-2008. Alex Indra Lukman merupakan anak dari almarhum Johannes Lukman. Johannes Lukman sendiri merupakan mantan ketua DPD PDI-P pada era orde baru sampai pasca

---

<sup>20</sup> Dpr.go.id. *op. cit.*,

<sup>21</sup> Bincang-bincang bersama bapak Afmar Aziz, atau yang akrab disapa Babak, di kedai kopi Nan Yo, yang beralamat di Jl. Kali Kecil No. 1, Kelurahan Kampung Pondok, Kec. Padang Selatan, Kota Padang. Beliau berprofesi sebagai pengacara dan merupakan masyarakat kelurahan Kampung Pondok yang sudah lama menetap dan mengetahui seluk beluk etnis Tionghoa di Kota Padang.



reformasi. Johannes Lukman juga merupakan mantan anggota DPR-RI dari fraksi PDI-P Komisi III pada tahun 1999-2004.

Etnis Tionghoa meskipun telah ratusan tahun berada di Indonesia dan di Kota Padang sendiri, tetapi mereka masih belum diterima sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa seutuhnya. Faktanya yang terjadi pada hari ini adalah semakin diperbesarnya batas-batas perbedaan diantara mereka dan masyarakat mayoritas. Oposisi terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, merupakan suatu contoh kasus bahwa perasaan anti orang (etnis) Tionghoa masih ada. Senada dengan itu, survei yang dilakukan Institute Of Southeast Asian Studies (ISEAS) yang berbasis di Singapura tahun 2017 mengafirmasi bahwa sentimen anti-Cina di Indonesia belum luntur, bahkan semakin menguat.<sup>22</sup>

Memang orang etnis Tionghoa adalah orang-orang yang bersikap fungsional. Artinya tindakan-tindakan mereka memiliki tujuan untuk mencapai sesuatu. Mereka juga dikenal gigih dalam berusaha untuk membuat kehidupan lebih baik bagi diri sendiri dan keluarganya. Karakter tersebut bagi sebagian orang, dianggap mencerminkan karakter materialistis dan pelit. Salah satu stereotip mengenai orang Tionghoa. Sederhananya, orang Tionghoa hanyalah salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia, sama seperti suku bangsa yang lain. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan, dan dalam semuanya itu mereka

---

<sup>22</sup> Riniwaty Makmur., *op. cit.*, hal. 23

berusaha bertahan hidup, karena Indonesia telah menjadi tanah air bagi mereka.<sup>23</sup>

Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Erniwati:

Orang Tionghoa itu memiliki etos kerja, semangat yang tinggi dan konsisten, apapun pekerjaan yang mereka lakukan, mereka sangat fokus dan bersungguh-sungguh, etos kerja inilah yang membuat mereka berada pada posisi (ekonomi) melebihi dari kita.<sup>24</sup>

Menurut Erniwati, adalah hal yang lumrah ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan maka akan memperoleh hasil yang membanggakan. Seperti juga yang terjadi pada kondisi prekonomian etnis Tionghoa di Kota Padang ini. Pekerjaan utama mereka adalah berdagang. Tak terkecuali dengan yang dilakukan oleh keluarga Alex Indra Lukman sendiri. Keluarga Alex Indra Lukman dikenal sebagai keluarga yang memiliki perekonomian yang cukup bagus. Beberapa usaha dagang dan bisnis lainnya telah mereka geluti sejak puluhan tahun yang lalu hingga hari ini. Seperti yang disebutkan oleh Ibu Erniwati:

Beliau adalah agen (distributor) Jamu Jago, itu sudah sangat lama sekali, mulai dari ayahnya, selain itu juga agen obat-obatan dan makanan. Albert sekarang ini merupakan agen (distributor) resmi produk-produk Unilever, sudah dua cabang dia pegang, kalau tidak salah cabang Kota Padang dan Kota Pariaman, selain itu juga Albert punya usaha bisnis karaoke di Pondok.<sup>25</sup>

Berdasarkan keterangan dari Ibu Erniwati, diketahui memang keluarga Alex Indra Lukman memiliki beberapa bisnis ekonomi yang cukup besar di Kota Padang. Mulai dari menjadi distributor resmi obat-obatan, makanan dan produk-produk rumah tangga harian, serta juga memiliki bisnis karaoke di pusat

---

<sup>23</sup> Riniwaty Makmur., *op. cit.*, hal. viii, sebuah pengantar.

<sup>24</sup> Erniwati., *op. cit.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*,

permukiman etnis Tionghoa Kota Padang. Hal ini juga dibenarkan sendiri oleh Albert Hendra Lukman pada saat wawancara yang peneliti lakukan, dia mengatakan:

Pak Alex dulu pernah jadi suplier tapi tidak begitu lama, kalau bisnis saya ya bisnis makelar lah begitu, apa barang kita jual sebagainya, kemudian 2007 itulah saya dapat pegang distributor unilever sampai sekarang sudah pegang dua cabang, berarti sekarang sudah berkembang.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengakuan dari Albert sendiri, bahwasanya keluarga mereka memang memiliki bisnis perekonomian di bidang distribusi barang-barang. Bisnis dan perekonomian mereka pada hari ini terbilang cukup berkembang dan memiliki omzet yang besar. Sebagaimana yang diketahui pada saat sekarang ini, fenomena orang-orang yang terjun ke ranah politik lebih kepada orientasi untuk mengejar akses ekonomi, kekuasaan dan fasilitas negara. Hal ini tidak bisa dipungkiri ketika melihat anggota-anggota dewan legislatif memiliki latar belakang seorang pebisnis. Perpolitikan di Indonesia pada hari ini tidak lagi diisi oleh orang-orang yang benar-benar seorang Negarawan, melainkan diisi oleh mereka para “pedagang”. Maka dari itu penulis berasumsi bahwa, seperti kebanyakan yang dilakukan oleh politisi lainnya, Alex Indra Lukman pun tidak luput akan hal itu dalam kepentingannya dalam masuk ke ranah politik di Sumatera Barat ini.

---

<sup>26</sup> Wawancara bersama Albert Hendra Lukman yang dalam penelitian ini bertindak sebagai informan utama. Albert Hendra Lukman saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P Kota Padang. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2019, pukul 15.00 WIB, di kantor DPC PDI-P Kota Padang yang beralamat di Jl. Batang Gadis Komplek Perumahan GOR H. Agus Salim, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang. (lihat lampiran foto no. 3, lampiran surat keterangan wawancara, dokumen no. 4).

Berdasarkan data dan keterangan yang penulis jabarkan secara panjang lebar di atas, penulis berasumsi bahwa proposal ini menarik untuk diteliti, karena partisipasi etnis Tionghoa dalam ranah politik cukup langka ditemukan di Kota Padang, serta motif-motif yang melatarbelakangi Alex Indra Lukman untuk masuk ke ranah politik. Apalagi saat ini, Alex telah lama berkiprah di dalam ranah politik dan sekarang telah menjabat di tingkat nasional (DPR-RI).

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti ingin melihat dan menjelaskan bagaimanakah bentuk partisipasi politik Alex Indra Lukman dan motivasi politiknya untuk masuk ke dalam ranah politik di Sumatera Barat.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk partisipasi politik serta motif politik Alex Indra Lukman.

### **D. Signifikansi penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis

Penelitian ini dapat menjelaskan bentuk partisipasi politik Alex Indra Lukman dan penelitian ini juga bisa jadi referensi tambahan bagi para peneliti yang ingin meneliti mengenai bentuk partisipasi politik. Penelitian ini tidak hanya melihat bentuk partisipasi politik tetapi juga kaitannya dengan motivasi politik.



## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi pengetahuan baru yang berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat minoritas dalam suatu daerah yang berkeinginan untuk terjun ke ranah politik. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami bagaimana bentuk partisipasi politik dan motivasi seorang kaum minoritas dalam sebuah daerah untuk bisa dan sukses berkiprah dalam dunia politik.

